RUSAK SEBELUM BEROPERASI

Kamis, 02 Agustus 2018 - Haikal Akbar

PINANG - Ombudsman Kepri menyoroti pembangunan Pelabuhan Dompak. Pasalnya pelabuhan di Tanjungpinang itu hampir selesai, namun sudah tiga tahun mangkrak.

"Kami sangat menyangkan kondisi Pelabuhan Dompak yang sudah hampir rampung tapi tidak di lanjutkan penyelesaiannya," kata Ketua Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari di Tanjungpinang, Rabu (1/8/2018).

Keberadaan pelabuhan yang dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu saat ini kondisinya memperihatinkan. Ia mengatakan, apabila pelabuhan Dompak itu diselesaikan tentu bisa dioperasikan dengan baik dan menjadi solusi mengatasi kesemrawutan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).

Selain itu, tidak akan ada lagi monopoli dalam pelayanan kepelabuhan antardaerah di Ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang ini. Menurut dia, jika ada pelabuhan penumpang lainnya, maka akan ada persaingan dalam pelayanan dan juga biaya yang dipungut di pelabuhan tersebut.

"Kita ketahui hanya ada pelabuhan SBP Tanjungpinang yang dikelola PT Pelindo. Jika ada dua atau tiga pelabuhan akan ada persaingan, dalam artian persaingan yang sehat," ujarnya.

Untuk itu, Kemenhub dan dalam hal ini pihak yang menjalankan proyek tersebut untuk berupaya aga menganggarkan lanjutan pekerjaan yang belum selesai tersebut. "Plabuhan itu sudah sampai 80 persen secara keseluruhan, bahkan mungkin lebih. Sementara untuk bangunan utama dan transtel serta ponton sudah selesai. Jadi tinggal finishing saja, kenapa tidak diselesaikan," kata dia.

Pihaknya akan meminta kepada Kesahbadaran Tanjungpinang dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri selaku pemilik lahan untuk mendesak agar Kemenhub bisa menggelontorkan kembali anggaran untuk penyelesian pelabuhan tersebut.

"Karena ini ada hubungan dengan pelayanan publik. Ombudsman bisa masuk untuk melakukan upaya penyelesaiannya, baik mengimbau dan langkah lainnya sesuai aturan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kepri, Jamhur Ismail mengaku akan melakukan upaya pendekatan dan lobi ke pemerintah pusat melalui Kemenhub RI terkait mangkarknya sejumlah pelabuhan di Kepri yang dibiayai dari APBN.

"Ada empat pelabuhan di Kepri yang dibangun oleh Kemenhub. Namun keempat pelabuhan tersebut mangkrak, karena timbul berbagai permaslahan," kata Jamhur.

Empat pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Tanjung Berakit di Bintan, Pelabuhan Malarko di Karimun dan dua pelabuhan

berada di Tanjungpinang yakni, Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan di Tanjung Mocoh.

"Untuk pelabuhan Dompak maslaah lahan sudah selesai dimana Pemprov Kepri telah menghibahkan lahan tersebut ke Kemenhub. Sedangkan untuk pelabuhan Tanjung Mocoh masih belum selesai, sebab yang memiliki lahan ini pihak swasta dan belum ada titik temunya," jelasnya.